

DEKOLONISASI TANPA REVOLUSI: STRATEGI DIPLOMASI, EKONOMI, DAN MONARKI BRUNEI DARUSSALAM DALAM LEPAS DARI KOLONIALISME INGGRIS (1888-1984)

Rudi Hartono

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Corresponden E-Mail: h.rudi@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel: (Diisi Editor)</i> <i>Diterima: 08 September 2025</i> <i>Direvisi: 10 September 2025</i> <i>Disetujui: 10 Oktober 2025</i> <i>Tersedia Daring: 30 October 2025</i></p> <hr/> <p>Kata Kunci: Brunei Darussalam, Dekolonisasi, Kolonialisme Inggris, Melayu Islam Beraja, Kedaulatan</p>	<p>Penelitian ini membahas proses dekolonisasi Brunei Darussalam sebagai salah satu kasus unik dalam sejarah Asia Tenggara. Berbeda dengan negara-negara tetangga yang menempuh jalur perjuangan nasionalis dan konflik bersenjata, Brunei memperoleh kemerdekaan melalui diplomasi elit, perjanjian internasional, serta pemanfaatan kekuatan ekonomi minyak dan gas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis dengan menelaah dokumen perjanjian, konstitusi, literatur akademik, dan laporan internasional. Analisis dilakukan dengan kerangka teori kedaulatan dan studi dekolonisasi yang menekankan peran aktor lokal (monarki), aktor eksternal (Britania Raya), serta struktur material (sumber daya ekonomi). Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun berada di bawah perlindungan Inggris sejak 1888, Brunei berhasil mempertahankan eksistensi monarki, menegosiasikan otonomi melalui Konstitusi 1959, serta menolak integrasi dengan Malaysia pada 1962. Puncak proses dekolonisasi ditandai dengan Perjanjian Persahabatan 1979, yang membuka jalan menuju proklamasi kemerdekaan 1 Januari 1984. Pasca-kemerdekaan, Brunei meneguhkan ideologi Melayu Islam Beraja (MIB), menjaga stabilitas politik, serta memanfaatkan kekayaan minyak untuk membangun negara kesejahteraan, meski masih menghadapi tantangan diversifikasi ekonomi dan kritik internasional terkait reformasi hukum Islam. Dengan demikian, pengalaman Brunei memperlihatkan bahwa dekolonisasi di Asia Tenggara tidak seragam, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang unik.</p>
Keywords:	ABSTRACT
<p><i>Brunei Darussalam,</i> <i>Decolonization, British</i> <i>Colonialism, Malay Islamic</i> <i>Monarchy, Sovereignty</i></p>	<p>This paper examines the decolonization process of Brunei Darussalam as a unique case in Southeast Asian history. Unlike neighboring countries that pursued nationalist struggles and armed conflict, Brunei gained independence through elite diplomacy, international treaties, and the use of its oil and gas economic power. This research uses a qualitative-historical approach by examining treaty documents, the constitution, academic literature, and international reports. The analysis is conducted within the framework of sovereignty theory and decolonization studies, emphasizing the roles of local actors (the monarchy), external actors (Great Britain), and material structures (economic resources). The study shows that despite being under British protection since 1888, Brunei managed to maintain its monarchy, negotiate autonomy through the 1959 Constitution, and reject integration with Malaysia in 1962. The peak of the decolonization process was marked by the 1979 Treaty of Friendship, which paved the way for the proclamation of independence on January 1, 1984. Post-independence, Brunei affirmed the ideology of Malay Islam Beraja (MIB), maintained political stability, and utilized oil wealth to build a welfare state, although still facing challenges of economic diversification and international criticism regarding Islamic law reform. Thus, Brunei's</p>

experience shows that decolonization in Southeast Asia was not uniform, but was influenced by a unique combination of internal and external factors.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Brunei Darussalam adalah sebuah kesultanan kecil yang terletak di pesisir utara Pulau Kalimantan, berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak (Malaysia). Meskipun ukurannya relatif kecil, baik dari sisi geografis maupun jumlah penduduk, Brunei memiliki posisi penting dalam sejarah modern Asia Tenggara karena menjadi salah satu negara terakhir yang memperoleh kemerdekaan penuh dari kekuatan kolonial Barat, yakni Britania Raya, pada 1 Januari 1984 (Saunders, 1994). Dalam literatur sejarah dekolonisasi Asia Tenggara, Brunei sering dianggap sebagai contoh unik. Hal ini disebabkan karena jalur kemerdekaan yang ditempuh tidak melalui perjuangan bersenjata masif atau gerakan nasionalisme yang luas sebagaimana terjadi di Indonesia, Vietnam, atau bahkan Filipina. Sebaliknya, Brunei menempuh jalan yang lebih diplomatis, yang sangat dipengaruhi oleh peran monarki, kekuatan ekonomi berbasis minyak, dan rangkaian perjanjian politik dengan Inggris yang mengatur tahapan transisi kedaulatan (Hussainmiya, 1995). Semenjak menandatangani Perjanjian Protektorat dengan Inggris pada tahun 1888, Brunei berada dalam posisi yang khas: tetap mempertahankan kedaulatan internal di bawah kepemimpinan Sultan, namun kehilangan kewenangan dalam urusan luar negeri dan pertahanan. Posisi ini menjadikan Brunei semi-otonom, tidak sepenuhnya dijajah sebagaimana daerah lain di Asia Tenggara, namun juga tidak sepenuhnya berdaulat (Leake, 1997).

Kajian mengenai kemerdekaan Brunei tidak dapat dilepaskan dari peran institusi monarki. Sultan Omar Ali Saifuddien III, misalnya, memainkan peran sentral dalam merumuskan Konstitusi 1959 yang memberi dasar bagi pemerintahan internal Brunei. Sementara itu, Sultan Hassanal Bolkiah melanjutkan proses diplomasi hingga tercapai Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama dengan Inggris pada tahun 1979 yang menjadi pintu menuju proklamasi kemerdekaan pada tahun 1984 (Cleary & Eaton, 1992). Oleh karena itu, pembahasan dalam makalah ini bertujuan untuk menelaah bagaimana Brunei Darussalam mampu melepaskan diri dari pengaruh kolonial Barat melalui kombinasi antara legitimasi monarki, negosiasi internasional, dan kekuatan ekonomi. Pendekatan ini penting bukan hanya untuk memahami sejarah Brunei itu sendiri, tetapi juga untuk memperluas pemahaman kita mengenai variasi proses dekolonisasi di dunia Islam modern, khususnya di kawasan Asia Tenggara.

Berangkat dari uraian tersebut, pendahuluan ini menegaskan bahwa proses kemerdekaan Brunei Darussalam merupakan fenomena historis yang berbeda dari pola dekolonisasi pada umumnya di Asia Tenggara. Keunikan tersebut terletak pada minimnya

konflik bersenjata, kuatnya peran institusi monarki, serta kemampuan negara kecil ini memanfaatkan sumber daya ekonomi khususnya minyak sebagai modal tawar dalam diplomasi dengan kekuatan kolonial. Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya sebagai studi sejarah nasional Brunei, tetapi juga sebagai kontribusi akademik dalam memahami dinamika dekolonisasi yang bersifat gradual, negosiatif, dan berbasis legitimasi tradisional di dunia Islam modern. Pendahuluan ini sekaligus menjadi landasan bagi pembahasan selanjutnya yang akan mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor politik, ekonomi, dan kelembagaan yang membentuk jalan kemerdekaan Brunei Darussalam.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-historis, yang bertujuan untuk memahami suatu peristiwa masa lampau melalui interpretasi terhadap sumber-sumber dan lisan. Metode analisis dokumen menjadi instrumen utama dalam penelitian ini. Dokumen primer yang digunakan antara lain Perjanjian Protektorat 1888, Supplementary Agreements 1905/1906, Konstitusi Brunei 1959, dan Perjanjian Persahabatan 1979 antara Brunei dan Inggris. Dokumen-dokumen ini memberi gambaran legal-formal tentang perubahan status kedaulatan Brunei dari waktu ke waktu (Hussainmiya, 1995). Metodologi ini juga mempertimbangkan faktor struktur material, khususnya peran sumber daya alam berupa minyak. Analisis ekonomi-politik digunakan untuk memahami bagaimana kekuatan fiskal dari minyak memberi daya tawar lebih besar bagi monarki Brunei dalam negosiasi dengan Inggris (Cleary & Eaton, 1992). Dengan kombinasi antara analisis dokumen, literatur akademik, dan teori kedaulatan serta dekolonisasi, penelitian ini berusaha menyajikan pemahaman yang sistematis tentang bagaimana Brunei Darussalam berhasil melepaskan diri dari kolonila barat.

3. Hasil dan Pembahasan

Kesultanan Brunei memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kekuatan politik dan ekonomi penting di Asia Tenggara sebelum masuknya pengaruh kolonial Barat. Sejak abad ke-15, Brunei dikenal sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Laut Cina Selatan dan sebagian besar kawasan pesisir Kalimantan, bahkan pengaruhnya menjangkau hingga ke Filipina bagian selatan, terutama Mindanao dan Sulu (Saunders, 1994). Posisi geografis Brunei yang strategis, yaitu di jalur perdagangan antara Tiongkok dan kepulauan Nusantara, menjadikannya pusat pertukaran komoditas seperti rempah-rempah, kapur barus, dan hasil hutan tropis. Puncak kejayaan Brunei biasanya dikaitkan dengan masa pemerintahan Sultan Bolkiah (1485–1524), di mana kekuasaan politik dan jaringan perdagangan Brunei berada pada titik terluas. Pada periode ini, Brunei membangun hubungan diplomatik dengan kekuatan besar regional, termasuk Tiongkok dan Kesultanan Malaka, serta menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Kalimantan bagian utara (Majul, 1999).

Keberhasilan politik ini juga didukung oleh legitimasi keagamaan, di mana Islam dijadikan sebagai fondasi utama pemerintahan, hukum, dan identitas sosial (Yegar, 2002). Namun, sejak abad ke-17 hingga ke-19, kekuasaan Brunei mengalami kemunduran.

Beberapa faktor utama penurunan ini antara lain: pertama, persaingan dengan kekuatan kolonial Eropa, terutama Spanyol dan Belanda, yang menguasai jalur perdagangan internasional di kawasan. Kedua, konflik internal antar bangsawan Brunei yang memperlemah otoritas kesultanan. Ketiga, bangkitnya keluarga Brooke di Sarawak (dikenal sebagai White Rajahs) yang secara bertahap mengambil alih wilayah Brunei sejak 1841 (Pringle, 1970). Kehilangan Sarawak dan wilayah sekitarnya menggerus kekuatan teritorial dan ekonomi Brunei secara signifikan. Selain itu, ekspansi Inggris di Asia Tenggara pada abad ke-19 semakin mempersempit ruang gerak Brunei. Inggris yang sebelumnya hadir melalui British North Borneo Company dan perjanjian dengan kesultanan-kesultanan lokal, pada akhirnya menekan Brunei untuk menerima status protektorat pada tahun 1888 (Hussainmiya, 1995).¹⁵ Sebelum masuk ke perjanjian tersebut, Brunei praktis sudah berada dalam posisi lemah, baik secara politik maupun ekonomi, sehingga sulit mempertahankan kedaulatannya tanpa intervensi pihak asing.

Perjanjian Protektorat 1888: Bentuk Baru Pengaruh Inggris

Perjanjian Protektorat 1888 merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Brunei Darussalam. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 September 1888 antara Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin dan pemerintah kolonial Britania Raya. Melalui perjanjian ini, Brunei secara resmi ditempatkan sebagai protektorat Inggris, meskipun secara formal tetap mempertahankan keberadaan Kesultanan dan pemerintahan internal (Saunders, 1994). Isi utama perjanjian tersebut menegaskan bahwa Sultan Brunei tidak dapat menjalin hubungan diplomatik atau perjanjian dengan negara asing tanpa persetujuan Pemerintah Inggris. Dengan demikian, seluruh urusan luar negeri dan pertahanan berada di bawah kontrol penuh Britania Raya. Sebaliknya, urusan dalam negeri secara nominal tetap berada di tangan Sultan, meskipun praktiknya Inggris mulai memengaruhi proses administrasi dan tata kelola kerajaan melalui pengangkatan pejabat Resident (Hussainmiya, 1995). Dari perspektif politik kolonial, status protektorat ini mencerminkan strategi Inggris untuk mengamankan jalur perdagangan dan mencegah ekspansi kekuatan kolonial lain, terutama Belanda, yang pada waktu itu mendominasi wilayah Kalimantan bagian selatan. Dengan menjadikan Brunei sebagai protektorat, Inggris berhasil mengontrol kawasan strategis di pesisir utara Kalimantan, sekaligus melindungi kepentingannya di British North Borneo (Leake, 1997). Bagi Brunei, kesepakatan ini merupakan kompromi.

Sultan Hashim menyadari posisi lemah Brunei akibat kehilangan banyak wilayah kepada keluarga Brooke di Sarawak dan ekspansi British North Borneo Company di Sabah. Menolak pengaruh Inggris berarti mempertaruhkan eksistensi politik Brunei yang sudah terancam. Dengan menerima status protektorat, Sultan berusaha mempertahankan kelangsungan institusi monarki sekaligus menjamin keamanan internal dari ancaman eksternal (Pringle, 1970). Meski demikian, perjanjian ini juga menandai berkurangnya kedaulatan Brunei secara signifikan. Kewenangan Sultan dalam diplomasi dan pertahanan negara hilang, dan secara bertahap kekuasaan internal pun mulai terpengaruh oleh campur tangan Inggris. Pada tahun 1905/1906, bahkan posisi British Resident secara resmi diperkenalkan untuk mengawasi pemerintahan sehari-hari, kecuali dalam bidang

agama Islam dan adat Melayu (Hussainmiya, 1995). Hal ini memperkuat kendali Inggris atas Brunei, meskipun tetap mempertahankan simbolisme monarki. Secara teoritis, status protektorat Brunei dapat dipahami sebagai bentuk kedaulatan terbatas (*limited sovereignty*). Di satu sisi, monarki masih berfungsi sebagai penguasa domestik, namun di sisi lain, kedaulatan eksternal yaitu pengakuan kontrol dalam sistem internasional sepenuhnya dipegang oleh Inggris (Jackson, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa Brunei tidak sepenuhnya “dijajah” seperti wilayah koloni murni, tetapi juga tidak sepenuhnya berdaulat. Status inilah yang membentuk dinamika hubungan Brunei-Inggris hingga pertengahan abad ke-20. Dengan demikian, Perjanjian Protektorat 1888 merupakan kompromi politik yang menyelamatkan Brunei dari kemungkinan penghapusan total sebagai entitas politik, tetapi sekaligus membatasi ruang gerak kedaulatan negara. Perjanjian ini menjadi dasar bagi struktur relasi kolonial yang berlangsung hingga Brunei akhirnya meraih kemerdekaan penuh pada 1984.

Perubahan Politik dan Sosial (1906-1959)

Periode antara 1906 hingga 1959 merupakan masa krusial bagi Brunei karena menandai pergeseran dari protektorat pasif menuju keterlibatan administratif Inggris yang lebih langsung. Pada 1906, setelah penandatanganan *Supplementary Agreement*, Inggris secara resmi menempatkan seorang British Resident di Brunei. Pejabat ini diberi wewenang luas dalam bidang pemerintahan sehari-hari, sementara Sultan hanya mempertahankan otoritas simbolik dalam urusan agama Islam dan adat Melayu (Hussainmiya, 1995). Sejak saat itu, meskipun secara formal masih kesultanan, Brunei pada praktiknya berada dalam orbit administrasi kolonial Inggris.

Konsolidasi Administrasi Kolonial

Penempatan British Resident membawa sejumlah perubahan struktural. Sistem administrasi pemerintahan diperbarui dengan model birokrasi Barat, termasuk pembukuan keuangan, hukum kontrak, serta pembentukan pasukan keamanan lokal. Inggris juga memperkenalkan sistem hukum modern yang dijalankan bersamaan dengan hukum adat dan hukum Islam, menandai dualisme hukum di Brunei (Saunders, 1994). Di sisi ekonomi, awal abad ke-20 ditandai dengan ekspansi eksplorasi minyak. Pada 1929, ditemukannya ladang minyak besar di Seria oleh *British Malayan Petroleum Company* menjadi titik balik ekonomi Brunei. Sejak itu, minyak menjadi tulang punggung pendapatan negara dan memperkuat posisi Sultan dalam negosiasi dengan Inggris. Minyak tidak hanya membawa pemasukan fiskal, tetapi juga memperkuat daya tawar Brunei sebagai negara kecil dengan sumber daya strategis (Cleary & Eaton, 1992).

Dinamika Sosial dan Pendidikan

Kebijakan Inggris juga memengaruhi struktur sosial Brunei. Sistem pendidikan modern mulai diperkenalkan pada awal abad ke-20, meskipun skalanya masih terbatas. Sekolah-sekolah pemerintah didirikan untuk mendidik putra-putri Brunei dalam bahasa Melayu dan Inggris. Hal ini menumbuhkan lapisan baru masyarakat terdidik yang kelak berperan dalam kehidupan politik modern (Leake, 1997). Namun, Inggris tidak mendorong modernisasi politik secara luas. Tidak ada upaya serius untuk membangun lembaga

perwakilan rakyat, karena mereka khawatir akan munculnya nasionalisme anti-kolonial seperti di Malaya atau Indonesia. Sebaliknya, Inggris berusaha mempertahankan stabilitas melalui dukungan pada monarki Brunei.

Perang Dunia II dan Dampaknya

Perang Dunia II menjadi pengalaman traumatis bagi Brunei. Pada tahun 1941–1945, Jepang menduduki Brunei setelah mengalahkan Inggris. Pendudukan Jepang memperlihatkan rapuhnya kekuasaan Inggris di Asia Tenggara dan meninggalkan dampak sosial-ekonomi yang berat, termasuk kerusakan infrastruktur minyak (Ooi, 2004). Setelah perang berakhir, Inggris kembali ke Brunei, tetapi otoritas kolonial mereka tidak lagi dipandang mutlak. Pengalaman perang juga menumbuhkan kesadaran baru di kalangan masyarakat Brunei mengenai pentingnya kedaulatan. Walaupun tidak muncul gerakan nasionalisme bersenjata seperti di Indonesia, namun muncul tuntutan untuk pembaruan politik dan perbaikan sosial.

Menuju Konstitusi 1959

Menyadari perubahan zaman, Sultan Omar Ali Saifuddien III yang naik takhta pada 1950 mengambil langkah strategis. Ia memodernisasi administrasi negara dan memperjuangkan otonomi yang lebih besar dari Inggris. Hasilnya, pada tahun 1959 ditandatangani sebuah Konstitusi Brunei yang menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan. Konstitusi 1959 mengatur bahwa Brunei memiliki pemerintahan internal sendiri di bawah Sultan, dengan dewan menteri, dewan legislatif, dan sistem birokrasi modern. Namun, urusan luar negeri dan pertahanan masih tetap dipegang oleh Inggris (Hussainmiya, 1995). Meskipun demikian, konstitusi ini memberi landasan hukum bagi kedaulatan internal Brunei dan memperkuat legitimasi monarki sebagai penguasa modern.

Signifikansi Periode 1906-1959

Periode ini menandai transformasi Brunei dari kesultanan tradisional yang lemah menjadi negara kecil yang mulai memiliki struktur pemerintahan modern dengan basis ekonomi yang kuat dari minyak. Meskipun masih berada di bawah bayang-bayang protektorat Inggris, Brunei berhasil mempertahankan eksistensinya dan membangun fondasi yang kelak digunakan untuk menegosiasikan kemerdekaan penuh pada 1984.

Krisis Politik dan Dampaknya

Periode awal 1960-an merupakan masa penuh ketegangan politik di Brunei. Puncaknya terjadi pada Desember 1962, ketika terjadi pemberontakan bersenjata yang dikenal sebagai **Brunei Revolt** yang dipimpin oleh Partai Rakyat Brunei (*Parti Rakyat Brunei/PRB*). Peristiwa ini menjadi titik balik dalam sejarah modern Brunei karena tidak hanya memperlihatkan adanya oposisi politik terhadap monarki, tetapi juga menentukan arah politik luar negeri Brunei: keluar dari rencana integrasi dengan Malaysia dan memperkuat sistem monarki absolut (Hussainmiya, 1995).

Latar Belakang Munculnya PRB

Partai Rakyat Brunei (PRB) dibentuk pada 1956 dengan kepemimpinan A.M. Azahari. PRB awalnya merupakan partai berhaluan nasionalis yang menuntut demokrasi parlementer, pembaruan sosial, serta pengakhiran dominasi Inggris di Brunei. Salah satu agenda utama PRB adalah menyatukan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam sebuah federasi yang disebut "Negara Kalimantan Utara" (*North Borneo Federation*) sebagai alternatif dari rencana pembentukan Federasi Malaysia yang digagas Inggris dan Malaya (Leake, 1997). Dukungan PRB berkembang pesat karena mengusung isu nasionalisme dan anti-kolonialisme. Mereka menuntut agar Brunei memperoleh kedaulatan penuh, sekaligus menolak ide Malaysia karena dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris yang akan mengurangi kedaulatan rakyat Brunei.

Pemberontakan 1962

Pemberontakan meletus pada 8 Desember 1962 ketika sayap militer PRB, yakni *Tentera Nasional Kalimantan Utara (TNKU)*, melakukan serangan bersenjata terhadap kantor-kantor pemerintahan, pos polisi, dan instalasi strategis di Brunei. Tujuannya adalah menggulingkan monarki, menolak rencana integrasi dengan Malaysia, serta memproklamasikan Negara Kalimantan Utara (Saunders, 1994). Namun, pemberontakan ini dengan cepat dipatahkan oleh kekuatan militer Inggris. Pasukan Gurkha yang ditempatkan di Singapura segera diterjunkan ke Brunei dan dalam waktu kurang dari seminggu berhasil menumpas perlawanan utama. Ribuan anggota PRB ditangkap, sementara A.M. Azahari melarikan diri ke Filipina.

Dampak Politik

Kegagalan pemberontakan 1962 membawa dampak politik yang besar. PRB dilarang dan seluruh aktivitas politik berbasis oposisi dihentikan. Hal ini menandai berakhirnya eksperimen demokrasi terbatas di Brunei, karena Sultan Omar Ali Saifuddien III mengambil langkah represif dengan memperkuat kekuasaan monarki dan memperkenalkan keadaan darurat yang berlaku hingga kini (Hussainmiya, 1995). Krisis ini memperkuat ketergantungan Brunei pada Inggris dalam bidang pertahanan dan keamanan. Meskipun Konstitusi 1959 telah memberi otonomi internal, kenyataannya Inggris tetap memegang peran vital dalam melindungi stabilitas Brunei dari ancaman eksternal maupun internal. Pemberontakan ini memengaruhi keputusan Brunei untuk tidak bergabung dengan Federasi Malaysia pada 1963. Sultan Omar Ali Saifuddien menilai bahwa integrasi dengan Malaysia akan melemahkan kedaulatan monarki dan membuka peluang dominasi etno-politik dari Malaya. Selain itu, kekayaan minyak Brunei dikhawatirkan akan dieksploitasi tanpa memberikan keuntungan maksimal bagi rakyat Brunei sendiri (Cleary & Eaton, 1992).

Signifikasni Krisis 1962

Pemberontakan 1962 dapat dipahami sebagai "pembelokan jalan sejarah" Brunei. Alih-alih mengikuti pola dekolonisasi berbasis nasionalisme rakyat seperti Indonesia atau Vietnam, Brunei memilih untuk memperkuat monarki sebagai aktor tunggal dalam proses menuju kemerdekaan. Pengalaman traumatis akibat pemberontakan membuat Sultan lebih berhati-hati terhadap liberalisasi politik dan memperkuat pendekatan konservatif

berbasis stabilitas, Islam, dan monarki. Dengan demikian, krisis 1962 bukan hanya peristiwa politik sesaat, melainkan penentu arah masa depan Brunei. Ia mengakhiri wacana demokratisasi, menegaskan penolakan terhadap integrasi regional, serta memperkuat jalan menuju kemerdekaan yang dikendalikan sepenuhnya oleh Sultan dan elit monarki.

Perjanjian Persahabatan 1979 Dan Jalan Menuju Kemerdekaan

Konteks Perjanjian 1979

Pada akhir 1970-an, terdapat beberapa faktor yang mendorong lahirnya perjanjian tersebut. Pertama, meningkatnya kesadaran nasional dan keinginan Sultan Hassanal Bolkiah untuk melepaskan diri dari bayang-bayang kolonialisme. Kedua, tekanan dari dinamika regional, khususnya berdirinya ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) pada 1967 yang semakin menekankan pentingnya kedaulatan penuh sebagai syarat keanggotaan. Ketiga, kekuatan ekonomi Brunei yang luar biasa berkat produksi minyak dan gas menjadikannya negara yang mampu berdiri sendiri secara fiskal tanpa bergantung pada Inggris (Cleary & Eaton, 1992).

Isi Perjanjian Persahabatan

Perjanjian 1979 menetapkan bahwa Inggris akan menyerahkan seluruh urusan pemerintahan, termasuk luar negeri dan pertahanan, kepada Brunei. Namun, untuk menjaga stabilitas, Inggris tetap akan memberikan bantuan teknis dan militer jika diminta oleh pihak Brunei. Dengan demikian, perjanjian ini bersifat transisional: menghapus status protektorat, tetapi tetap memungkinkan hubungan bilateral yang erat antara Brunei dan Inggris (Saunders, 1994). Perjanjian ini juga menekankan prinsip kesetaraan, yaitu bahwa hubungan Brunei-Inggris pasca-1979 bukan lagi antara penguasa kolonial dan protektorat, melainkan antara dua negara berdaulat yang menjalin kerja sama dalam bidang diplomasi, pertahanan, dan ekonomi.

Proklamasi Kemerdekaan 1984

Berdasarkan perjanjian tersebut, Brunei secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya pada 1 Januari 1984. Upacara proklamasi berlangsung di Bandar Seri Begawan dan dihadiri oleh perwakilan negara-negara sahabat, termasuk anggota ASEAN. Dalam pidato resminya, Sultan Hassanal Bolkiah menegaskan bahwa Brunei akan menjadi negara yang berlandaskan prinsip *Melayu Islam Beraja (MIB)*—yakni monarki absolut yang berakar pada tradisi Melayu dan hukum Islam sebagai dasar negara (Hussainmiya, 1995). Segera setelah proklamasi, Brunei diterima menjadi anggota penuh PBB pada 21 September 1984 dan kemudian bergabung dengan ASEAN pada 7 Januari 1984. Keanggotaan ini menandai pengakuan internasional atas kedaulatan Brunei serta memperkuat posisinya sebagai negara merdeka di Asia Tenggara (Ooi, 2004).

Dampak Perjanjian 1979 dan Kemerdekaan

Kemerdekaan Brunei membawa sejumlah konsekuensi penting. Pertama, Brunei menjadi salah satu negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita berkat pendapatan minyak dan gas, sehingga dapat menjalankan kebijakan *welfare state* tanpa beban hutang

eksternal. Kedua, stabilitas politik relatif terjaga karena Sultan mengendalikan penuh pemerintahan dengan menekankan loyalitas rakyat melalui kebijakan kesejahteraan dan penguatan identitas MIB (Brown, 1994).³⁴ Ketiga, hubungan Brunei-Inggris tetap erat pasca-1984, terutama dalam bidang pertahanan. Inggris masih menempatkan pasukan Gurkha di Brunei atas undangan pemerintah setempat, sebagai jaminan keamanan dari potensi ancaman eksternal maupun internal. Dengan demikian, meskipun secara formal berdaulat penuh, Brunei tetap menjaga pola hubungan khusus dengan mantan penguasanya.

Signifikansi Sejarah

Perjanjian Persahabatan 1979 dan proklamasi kemerdekaan 1984 memperlihatkan jalur dekolonisasi yang khas: bukan melalui perang atau gerakan nasionalis masif, melainkan melalui diplomasi elit, dukungan monarki, serta basis ekonomi minyak. Hal ini menegaskan bahwa dekolonisasi di Asia Tenggara tidak bersifat seragam, melainkan bervariasi sesuai kondisi internal masing-masing negara. Dalam kasus Brunei, keberhasilan mempertahankan monarki menjadi faktor pembeda utama dari negara-negara tetangganya.

Brunei Pasca Kemerdekaan (1984-Sekarang)

Sistem Politik dan Ideologi Negara

Pasca-kemerdekaan, Brunei mengukuhkan ideologi nasional Melayu Islam Beraja (MIB) sebagai fondasi negara. Ideologi ini menegaskan tiga unsur utama: 1) melayu sebagai identitas etno budaya, 2) islam sebagai agama resmi dan basis hukum, 3) beraja (monarki) sebagai system politik. Dengan MIB, Sultan Hassanal Bolkiah memperkuat peran monarki absolut dalam seluruh aspek pemerintahan. Konstitusi 1959 tetap berlaku, tetapi kebebasan politik sangat terbatas. Partai politik praktis tidak berfungsi, dan keadaan darurat yang diberlakukan sejak 1962 masih dipertahankan hingga saat ini. Dengan demikian, Brunei mengadopsi model stabilitas politik berbasis monarki paternalistik, di mana legitimasi Sultan dijaga melalui kesejahteraan rakyat, distribusi ekonomi, dan simbolisme agama (Hussainmiya, 1995).

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Ekonomi Brunei bertumpu hampir sepenuhnya pada ekspor minyak dan gas. Sektor energi menyumbang lebih dari 90% pendapatan negara dan menjadikan Brunei memiliki cadangan devisa yang besar (Cleary & Eaton, 1992). Namun, ketergantungan yang tinggi pada minyak dan gas juga menimbulkan tantangan besar. Fluktuasi harga energi global berpotensi mengganggu keberlanjutan fiskal Brunei. Meskipun pemerintah telah meluncurkan *Wawasan Brunei 2035* untuk mendiversifikasi ekonomi melalui sektor keuangan, pariwisata, dan teknologi, ketergantungan pada minyak masih sangat dominan hingga kini (Ooi, 2004).

Hubungan Luar Negeri dan ASEAN

Sejak kemerdekaan, Brunei aktif dalam diplomasi regional dan global. Bergabung dengan ASEAN pada 7 Januari 1984, Brunei memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara, meskipun kebijakan luar negerinya cenderung konservatif dan mengutamakan hubungan damai. Brunei juga menjadi anggota penuh PBB pada tahun

1984, serta aktif dalam *Organization of Islamic Cooperation (OIC)*, mencerminkan identitasnya sebagai negara Islam modern (Leake, 1997). Brunei tetap mempertahankan hubungan dekat dengan Inggris, terutama dalam bidang pertahanan. Pasukan Gurkha Inggris masih ditempatkan di Brunei, menunjukkan kesinambungan dari Perjanjian 1979. Selain itu, Brunei juga menjalin kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, Singapura, dan negara-negara ASEAN lainnya sebagai bagian dari strategi menjaga keamanan di kawasan Laut Cina Selatan (Singh, 2010)

Reformasi Hukum Islam

Sejak 2014, Brunei menarik perhatian dunia dengan penerapan Syariah Penal Code Order (SPCO), yaitu hukum pidana Islam yang berlaku secara bertahap. Kebijakan ini menegaskan identitas Brunei sebagai negara Islam yang konsisten dengan ideologi MIB. Meskipun menuai kritik internasional, terutama terkait hak asasi manusia, pemerintah Brunei menegaskan bahwa penerapan hukum syariah adalah bagian dari kedaulatan nasional dan tradisi keislaman yang harus dihormati (Yegar, 2002).

Signifikansi Pasca-Kemerdekaan

Pasca-1984, Brunei menunjukkan bahwa negara kecil dengan basis monarki absolut dapat bertahan dalam era modern melalui kombinasi antara kekayaan sumber daya, ideologi nasional yang kuat, dan diplomasi internasional yang hati-hati. Stabilitas politik relatif terjaga, meskipun dengan keterbatasan demokrasi. Brunei berhasil menjaga kedaulatannya, sekaligus mempertahankan identitas unik sebagai kesultanan Islam di Asia Tenggara.

4. Kesimpulan

Sejarah Brunei Darussalam dalam melepaskan diri dari dominasi kolonial Barat merupakan salah satu contoh khas dari variasi jalur dekolonisasi di Asia Tenggara. Tidak seperti Indonesia, Vietnam, atau Filipina yang menempuh jalur perjuangan nasionalis bersenjata, Brunei memilih jalur diplomasi elit, kompromi politik, dan pemanfaatan kekuatan ekonomi untuk memperoleh kedaulatan penuh. Pertama, dari perspektif historis, Brunei yang pernah berjaya sebagai kerajaan maritim pada abad ke-15 mengalami kemunduran signifikan pada abad ke-19, sehingga akhirnya menerima status protektorat Inggris melalui Perjanjian 1888. Meskipun hal itu membatasi kedaulatan eksternal, Sultan berhasil mempertahankan eksistensi monarki, yang menjadi fondasi penting bagi kelangsungan politik Brunei. Kedua, periode 1906–1959 menunjukkan bagaimana Inggris secara bertahap memperkuat pengaruhnya melalui British Resident, tetapi pada saat yang sama, penemuan minyak tahun 1929 memberikan Brunei sumber daya ekonomi yang sangat besar. Minyak inilah yang kemudian menjadi modal utama bagi Sultan dalam menegosiasikan otonomi internal melalui Konstitusi 1959. Ketiga, krisis politik 1962 menjadi titik balik penting. Kegagalan pemberontakan Partai Rakyat Brunei justru memperkuat posisi monarki dan menutup jalan demokratisasi. Sejak saat itu, Brunei menolak integrasi ke dalam Federasi Malaysia, memilih jalan mandiri, dan semakin menekankan monarki absolut sebagai penjamin stabilitas.

Keempat, Perjanjian Persahabatan 1979 menandai fase akhir proses dekolonisasi. Melalui perjanjian ini, Inggris menyerahkan seluruh urusan pemerintahan kepada Brunei

dengan tetap menjalin hubungan bilateral. Pada 1 Januari 1984, Brunei resmi memproklamasikan kemerdekaannya dengan ideologi negara Melayu Islam Beraja (MIB). Kelima, pasca-kemerdekaan, Brunei berhasil mempertahankan stabilitas politik, memperkuat identitas Islam-Melayu, dan memanfaatkan kekayaan minyak untuk membangun negara sejahtera. Meski menghadapi tantangan diversifikasi ekonomi dan kritik terhadap sistem monarki absolut serta penerapan hukum syariah, Brunei tetap menjadi contoh unik negara kecil yang berdaulat penuh dengan stabilitas tinggi. Dengan demikian, pengalaman Brunei memperlihatkan bahwa jalur dekolonisasi tidak bersifat seragam. Dalam kasus Brunei, kombinasi legitimasi monarki, dukungan ekonomi minyak, dan diplomasi dengan Inggris memungkinkan negara kecil ini bertahan dan meraih kemerdekaan tanpa gejolak besar. Sejarah Brunei juga menegaskan peran penting monarki Islam dalam menjaga identitas nasional sekaligus membentuk model pemerintahan yang berbeda dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

5. Daftar Pustaka

- Ambarizki, A. D. P., & Laksono, T. M. (2024). *Perbandingan Sistem Administrasi Negara Indonesia dengan Brunei Darussalam*. *Irpia: Jurnal Ilmiah Riset dan Pengembangan*, 9(8). ([Ejournal Irpia](#))
- Brown, D. (1994). *The state and ethnic politics in Southeast Asia*. Routledge.
- Cleary, M., & Eaton, P. (1992). *Borneo: Change and development*. Oxford University Press.
- Fakhriati, N. F. N. (Center for Research and Development of Religious Literature and Heritage, Ministry of Religious Affairs RI). (2021). *Brunei And Aceh: A Manuscript-Based Study of Cultural And Historical Relationship*. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(1). ([Jangka Kemenag](#))
- Firdaus, A. M., Ibrahim, N., & Kurniawati, K. (2023). *Hubungan Diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam Pada Masa Presiden Suharto & Sultan Hassanal Bolkiah, 1984- 1998*. *Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan*, 10(1), 140-155. ([E-Journal Hamzanwadi](#))
- Hussainmiya, B. A. (1995). *Sultan Omar Ali Saifuddien III and Britain: The making of Brunei Darussalam*. Oxford University Press.
- Leake, D. (1997). The Brunei revolt of 1962. *Journal of Southeast Asian Studies*, 28(1), 47-69. <https://doi.org/10.1017/S0022463400013707>
- Mariana, A. H., & Pelawi, A. I. (2022). *Jejak Peradaban Islam dan Tamadun Melayu di Brunei*. *PERADA: Jurnal Studi Islam dan Melayu*. ([Rumah Jurnal STAIN Kepri](#))
- Ooi, K. G. (2004). *Southeast Asia: A historical encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor*. ABC-CLIO
- Putra, J. S. (2021). *Melayu Islam Beraja dan Implementasinya pada Masa Sultan Hassanal Bolkiah Tahun 1984-2019*. *Hadharah: Jurnal Keislaman dan Peradaban*. ([Ejournal Uinib](#))
- Royyani, M. A., & Shobaruddin, M. (2022). *Islam, State, and Nationalism in Brunei Darussalam, India, Indonesia, and Malaysia: A Comparative Perspective*. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 21(2). ([Jurnal Walisongo](#))
- Saunders, G. (1994). *A history of Brunei*. Oxford University Press.
- Singh, B. (2010). *Defense and security in Southeast Asia*. ISEAS.

Yegar, M. (2002). *Between integration and secession: The Muslim communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar*. Lexington Books.